

**EVALUASI PROGRAM SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) NASIONAL
PRESISI DI DITLANTAS POLDA METRO JAYA****Andi Agusfian Pranata**

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) PTIK Jakarta, Indonesia

Andipranata2010@gmail.com

Keywords	Abstract
<i>Driving License; Driver's License; Online; Service</i>	<i>The Precision National SIM Program (SINAR) has encouraged the digitization of driving licensing (SIM) services in Indonesia through technology integration, including in the Traffic Directorate of Polda Metro Jaya. However, even though this program provides convenience with online services, there are challenges such as people's preferences who still tend to use offline services. Evaluation through the CIPP approach is considered to be able to help in understanding the context, resource allocation, implementation process, and overall impact of the program to find ways to improve SIM services, reduce congestion at service locations, and improve traffic safety. Therefore, the CIPP approach in this evaluation is implemented thoroughly in the SINAR Program (Precision National Driving License). The research method used is a qualitative method. The theories used in the research are Policy Evaluation Theory, Program Evaluation Concept, Precision National SIM Program Concept and CIPP Program Evaluation Model. The results of the research show that the Precision National SIM Program (SINAR), a digitalization initiative for the One-Stop Single Administration System (Samsat) of the National Police Traffic Corps, introduced to improve SIM making services by speeding up the process, reducing queues, and minimizing SIM misuse through the Online SIM application. Despite providing great benefits, this program faces technical challenges, including problems with the SINAR application and problems sending SIMs through PT. Indonesian post. Evaluation using the CIPP approach has been proven to help analyze various aspects of the program to improve effectiveness. The Precision National Driver's License Program at the Polda Metro Jaya Traffic Directorate utilizes advanced technology to improve efficiency, service quality, public education and compliance with regulations. Evaluations with CIPP compare the quality of services between the programs, highlighting differences and areas for improvement.</i>
Kata Kunci	Abstrak
Surat Izin Mengemudi, SIM, Online, Pelayanan	Program SIM Nasional Presisi (SINAR) telah mendorong digitalisasi layanan perizinan mengemudi (SIM) di Indonesia melalui integrasi teknologi tak terkecuali di Ditlantas Polda Metro Jaya. Namun, meskipun program ini memberikan kemudahan dengan layanan online, terdapat tantangan seperti preferensi masyarakat yang masih cenderung menggunakan layanan offline. Evaluasi melalui pendekatan dinilai CIPP dapat membantu dalam memahami konteks, alokasi sumber daya, proses implementasi, serta dampak keseluruhan program untuk menemukan cara memperbaiki layanan SIM, mengurangi kepadatan di lokasi pelayanan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas. Oleh karena itu pendekatan CIPP dalam evaluasi ini diimplementasikan secara menyeluruh ada Program SINAR (SIM Nasional Presisi). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teori yang

digunakan dalam penelitian adalah Teori Evaluasi Kebijakan, Konsep Evaluasi Program, Konsep Program SIM Nasional Presisi dan Model Evaluasi Program CIPP, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program SIM Nasional Presisi (SINAR), inisiatif digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Korlantas Polri, diperkenalkan untuk meningkatkan layanan pembuatan SIM dengan mempercepat proses, mengurangi antrian, dan meminimalisir penyalahgunaan SIM melalui aplikasi SIM Online. Meskipun memberi manfaat besar, program ini menghadapi tantangan teknis, termasuk gangguan aplikasi SINAR dan kendala pengiriman SIM melalui PT. Pos Indonesia. Evaluasi menggunakan pendekatan CIPP terbukti membantu menganalisis berbagai aspek program untuk perbaikan efektivitas. Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, edukasi masyarakat, dan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi dengan CIPP membandingkan kualitas layanan antara program tersebut, menyoroti perbedaan dan area perbaikan.

Corresponding Author: Andi Agusfian Pranata
E-mail: Andipranata2010@gmail.com



PENDAHULUAN

Saat ini, hampir setiap keluarga memiliki paling tidak satu kendaraan (Gopinath et al., 2021). Oleh karena itu, untuk dapat mengemudikan kendaraan pribadi, seseorang harus memiliki Surat Izin Mengemudi yang dikeluarkan oleh Korlantas Polri, khususnya pada bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Penerbitan SIM, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 14 Ayat 1, huruf b dan Pasal 15 Ayat 2 huruf c, dan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada bab VIII (Suryani & Mashdurohatun, 2016).

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah sebuah dokumen penting yang serupa dengan kartu identitas pemerintah lainnya, yang diberikan oleh Korlantas Polri (Sulistiyo & Shihab, 2023). Dokumen ini menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki izin resmi untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum tanpa perlu pengawasan tambahan. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada bab VIII, tindakan mengemudi di jalan raya tanpa memiliki SIM yang disetujui oleh Korlantas Polri dianggap sebagai pelanggaran hukum, dan pelanggaran tersebut akan berakibat pada pemberian sanksi yang sesuai (Mulyani et al., 2020).

Proses pengajuan SIM cukup mudah yang melibatkan beberapa tahapan. Pertama, mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas (KTP), kartu keluarga (KK), dan surat keterangan sehat dari dokter. Setelahnya, dapat dilakukan pendaftaran secara online melalui situs web resmi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau langsung mendatangi kantor polisi yang memiliki layanan penerbitan SIM. Setelah pendaftaran, adalah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh dokter yang ditunjuk oleh kepolisian untuk memastikan pemohon SIM dalam kondisi kesehatan yang memadai untuk mengemudi. Jika lulus pemeriksaan kesehatan, pemohon SIM mengikuti ujian teori yang menguji pengetahuan pemohon SIM tentang aturan lalu lintas dan keselamatan berkendara (Nastiti, 2017). Jika berhasil melewati ujian teori, pemohon SIM akan dilakukan ujian praktik di mana pemohon akan mengemudi sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh petugas ujian. Jika pemohon berhasil melewati ujian praktik, pemohon akan diberikan SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang diuji, dengan masa berlaku SIM tersebut selama 5 (lima) tahun, dan dapat dilakukan perpanjangan kembali secara online

maupun dengan datang langsung ke SAMSAT (Perpol No. 2 Tahun 2021 tentang Sistem Penerbitan SIM secara Digital) (Safria, 2020).

Untuk mempermudah layanan perpanjangan SIM saat ini telah diberlakukan Program SIM Nasional Presisi, yang merupakan salah satu inovasi yang diterapkan oleh Direktorat LaluLintas Polda Metro Jaya sebagai bagian dari implementasi E-Policing pada tahun 2021. Program ini merupakan pengembangan dari SIM Online yang bertujuan untuk mengintegrasikan data secara nasional dan memfasilitasi proses pendaftaran secara online (Safria, 2020).

Tingkat keberhasilan Program SIM Nasional Presisi tidak hanya mempengaruhi efisiensi pelayanan SIM, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas pada keselamatan lalu lintas. Keberhasilan program ini seharusnya membantu meningkatkan pemantauan dan penegakan aturan lalu lintas, sekaligus mengurangi jumlah pemohon SIM yang harus mendatangi Satpas secara fisik (Rahmawati, 2019). Dengan demikian, penggunaan layanan online yang lebih luas seharusnya berkontribusi pada pengurangan kerumunan di Satpas.

Namun, jika masyarakat masih lebih cenderung memilih pendekatan offline, terutama dalam jumlah besar seperti yang terlihat dari data, maka program ini belum mencapai potensinya dalam mengurangi kepadatan di Satpas. Dampak lanjutan dari hal ini adalah bahwa kemacetan di Satpas dan jalan raya, sehingga persoalan ini tetap menjadi masalah yang mempengaruhi mobilitas dan keselamatan lalu lintas (BAHYOGI SAPRIL SIALLAGAN, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi pada Context, Input, Process, dan Product dalam Program SIM Nasional Presisi, agar membantu dalam memahami lebih dalam konteks program, sumber daya yang digunakan, proses pelaksanaan, dan hasil yang dicapai (Sumaryanto & Kustiyono, 2016). Hal ini sejalan dengan penjelasan Yetti dan Muqorobin (2021), ia mengemukakan bahwa evaluasi CIPP membantu dalam merinci aspek-aspek yang berbeda dari program pengembangan kompetensi guru, mulai dari pemahaman konteks hingga manajemen sumber daya, proses pelaksanaan, dan dampak pada hasil. Hal ini memungkinkan peneliti dan pengelola program untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang program tersebut, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengembangkan rekomendasi yang relevan untuk pengembangan program yang lebih baik.

Temuan serupa juga disampaikan oleh Lucky, dkk. (2023), yang menyatakan bahwa fungsi evaluasi CIPP adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks, mengelola sumber daya dengan efisien, memastikan pelaksanaan program yang baik, dan mengukur dampak program pelatihan menjahit di BLKK Amanah. Ia juga menjelaskan bahwa melalui evaluasi CIPP ini memberikan pemahaman komprehensif tentang program pelatihan dan memberikan landasan untuk perbaikan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan program tersebut (Suryadin et al., 2022).

Herlan, dkk., (2023), dalam penelitiannya juga menyatakan hal serupa evaluasi CIPP memiliki fungsi utama dalam memahami konteks, mengukur keberhasilan program, mengidentifikasi faktor penghambat, dan memberikan dasar untuk perbaikan program. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan pelaksanaan program dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa dalam aspek Context, evaluasi perlu mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi preferensi masyarakat dalam menggunakan layanan online atau offline. Aspek Input akan mengevaluasi sumber daya yang telah dialokasikan untuk program ini, termasuk sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran (Pongsilurang, 2022). Apakah sumber daya ini telah digunakan secara efisien, dan apakah peningkatan atau perbaikan perlu dilakukan? Dalam aspek Process, evaluasi akan memeriksa bagaimana

program ini diimplementasikan, termasuk efektivitas kampanye sosialisasi, keamanan data, dan pengalaman pengguna dengan aplikasi mobile. Dapatkah proses ini dioptimalkan untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan layanan online? Terakhir, dalam aspek Product, evaluasi akan mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh program ini, baik dalam hal efisiensi pelayanan SIM maupun dampaknya pada keselamatan lalu lintas. Apakah program ini mencapai tujuannya dalam mengurangi kepadatan di Satpas dan memperbaiki mobilitas lalu lintas? Dengan evaluasi CIPP yang komprehensif, diharapkan akan lebih mudah mengidentifikasi kendala dan peluang dalam Program SIM Nasional Presisi dan merumuskan tindakan perbaikan yang relevan. Selain itu, hasil evaluasi ini akan membantu program ini mencapai tujuannya untuk memberikan pelayanan SIM yang lebih mudah diakses dan efisien secara online, serta berkontribusi pada keselamatan lalu lintas yang lebih baik (Edithya, 2019).

Sesuai dengan kepentingan dilakukannya evaluasi pada Program SIM Nasional Presisi di wilayah DKI Jakarta tersebut, maka judul penelitian yang dapat menjawab semua kebutuhan tersebut adalah **Evaluasi Program Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional Presisi Di Ditlantas Polda Metro Jaya**.

Penelitian ini ditujukan untuk:

1. Mengevaluasi Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya berdasarkan prespektif Context, Input, Process and Product.
2. Mengevaluasi perbandingan kualitas pelayanan antara Program SIM Nasional Presisi dengan Program SIM sebelumnya di Ditlantas Polda Metro Jaya berdasarkan prespektif Context, Input, Process and Product.

Landasan Teori

1. Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi diartikan sebagai proses penilaian terhadap pencapaian tujuan dengan mengumpulkan dan menganalisis data yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan tentang nilai dari suatu program (Mustafa, 2021). Evaluasi juga dikenal sebagai sebuah proses yang menggambarkan, mengumpulkan, dan memberikan informasi yang bersifat deskriptif dan penilaian tentang nilai dan keberhasilan tujuan, desain, pelaksanaan, dan dampak suatu objek untuk membimbing pengambilan keputusan, memenuhi tuntutan akuntabilitas, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang terlibat. Evaluasi juga dapat diketahui sebagai proses yang memberikan informasi yang bermakna dan berguna sebagai alternatif keputusan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menyajikan pilihan kepada para pengambil keputusan (Christiani, 2018).

Menurut Rusydi (2017: 44), evaluasi dijelaskan sebagai proses memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menilai nilai dan manfaat (worth and merit) dari pencapaian tujuan, desain, implementasi, dan dampak suatu objek dengan tujuan membantu pengambilan keputusan, menjalankan pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena. Dengan kata lain, pada dasarnya, evaluasi merupakan penyediaan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Paramitha & Mulyadi, 2017).

Evaluasi sebagai identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria yang dapat dipertahankan untuk menentukan nilai objek evaluasi (nilai atau keberhasilan) dalam hubungannya dengan kriteria-kriteria tersebut. Evaluasi melibatkan pembelajaran tentang program baru melalui pengumpulan informasi, dan informasi ini harus terkait dengan pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi program adalah suatu kegiatan yang menggunakan prosedur khusus untuk mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan melihat bagaimana aplikasi dari kriteria-kriteria yang ada. Dari informasi yang diperoleh, seorang evaluator dapat menilai apakah program telah berjalan sesuai dengan rencana, apakah perbaikan diperlukan, atau bahkan apakah program

tersebut perlu dihentikan. Informasi ini sangat penting bagi para pembuat keputusan. Tujuan dari evaluasi program menurut Weiss (dalam Rusydi, 2017: 46), antara lain:

1. Menggunakan metode penelitian dalam proses evaluasi.
2. Menekankan pada hasil yang diperoleh dari suatu program.
3. Menggunakan kriteria tertentu untuk menilai kualitas program.
4. Memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa yang akan datang.

Sedangkan menurut Kirkpatrick (dalam Rusydi, 2017: 49), urgensi dari evaluasi program melibatkan hal-hal berikut:

1. Untuk menunjukkan apakah alokasi dana yang telah digunakan sebanding dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilakukan oleh program tersebut.
2. Untuk membantu menentukan apakah kegiatan program harus diteruskan atau dihentikan.
3. Untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan program dimasa yang akan datang.

Sedangkan Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses sistematis yang digunakan untuk menilai dan menganalisis dampak serta efektivitas kebijakan publik yang telah diimplementasikan. Tujuan utama dari evaluasi kebijakan publik adalah untuk memahami apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan, apakah ada perubahan yang perludilakukan, dan apakah sumber daya telah digunakan dengan efisien (Subianto, 2020).

Menurut Keban (2004: 55) bahwa kebijakan dapat dilihat sebagai konsep filosofi, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebagai suatu konsep filosofis merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan.
2. Sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi.
3. Sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan
4. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Proses analisis kebijakan publik menurut Dunn (2000: 33) adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan divisualisasikan sebagai rangkaian tahap yang saling bergantung dan diatur menurut urutan waktu, yang meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sementara itu, aktivitas intelektual meliputi perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

2. Konsep Evaluasi Program

Program adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan eksekusi dari suatu kebijakan. Secara umum, program bisa diartikan sebagai "rencana" yang dilaksanakan oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ketika dikaitkan dengan evaluasi program, program didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang merupakan implementasi kebijakan, berlangsung dalam jangka waktu yang berkelanjutan, dan melibatkan sekelompok orang dalam suatu organisasi (Solichin, 2015).

Namun, kenyataannya ada program-program yang berjalan dalam waktu singkat. Selain tiga persyaratan tersebut, ada juga program-program khusus yang memiliki ciri-ciri tambahan, yaitu serangkaian kegiatan yang berhubungan erat satu sama lain. Sebagai

contoh, program pembelajaran adalah jenis program yang terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti penyusunan kurikulum, penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus dan RPP, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasinya (Yanti, 2021).

Jaedun (2010), juga menjelaskan bahwa berdasarkan sifat kegiatan yang terlibat, program dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

1. Program Pemrosesan

Program ini fokus pada kegiatan utama untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi, yang disebut sebagai output. Ciri khas dari program pemrosesan adalah mengubah bahan mentah sebagai input untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan program. Sebagai contoh, program pembelajaran mengubah siswa yang belum menguasai ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan tertentu menjadi siswa yang menguasainya melalui suatu proses transformasi yang disebut program pembelajaran.

2. Program Layanan

Program layanan adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan pihak tertentu yang dilayani (pelanggan) sehingga pelanggan merasa puas karena kebutuhan mereka terpenuhi. Contohnya adalah program layanan perpustakaan dan program koperasi. Orientasi utama dari program layanan ini adalah kepuasan pelanggan, karena kebutuhan pelanggan harus dipenuhi sesuai dengan yang dijanjikan oleh program.

3. Program Umum

Berbeda dari program pemrosesan yang memiliki komponen-komponen yang jelas seperti masukan (input), kegiatan pemrosesan, dan keluaran (output), serta program layanan yang dapat diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pelanggan, program jenis ketiga ini tidak memiliki ciri utama yang jelas. Contohnya adalah program makanan tambahan anak sekolah (PMTAS) dan program peringatan lustrum sekolah.

Menurut Ridwan dan Nur (2022), ada beberapa ahli yang mendefinisikan evaluasi. Menurut Bloom et al. (sebagaimana yang disebut dalam Daryanto, 2012), evaluasi adalah tindakan pengumpulan informasi secara terstruktur untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan dalam peserta didik dan untuk mengukur sejauh mana tingkat perubahan dalam aspek pribadi peserta didik. Dalam pandangan McDavid dan Hawthorn (2006: 3), evaluasi dapat dianggap sebagai suatu proses terstruktur yang bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan informasi dengan tujuan mengurangi tingkat ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan terkait dengan suatu program atau kebijakan tertentu. Teori ini juga diperkuat oleh Fitzpatrick, Jody L, et al. (2011), yang menjelaskan bahwa evaluasi merupakan bentuk dasar dari perilaku manusia, terkadang bersifat terstruktur dan resmi, namun seringkali bersifat impresionistik dan bersifat pribadi. Fokus utama evaluasi mereka adalah pada pendekatan yang lebih terstruktur, resmi, dan bersifat publik. Selanjutnya, menurut Osman (2002: 6), evaluasi adalah suatu proses penilaian yang sistematis dan obyektif terhadap program berkelanjutan, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga hasil akhir. Tujuannya adalah untuk menilai relevansi, pemenuhan tujuan, efisiensi, efektivitas, dan dampak yang berkelanjutan dari program tersebut. Sitiatava (2013: 15) menjelaskan bahwa evaluasi adalah suatu proses di mana informasi dipertimbangkan untuk membuat kebijakan yang akan diterapkan di masa depan. Dengan kata lain, evaluasi memerlukan proses penilaian dan penilaian dalam kerangka yang lebih luas.

Oleh karena itu, Ridwan dan Nur (2022), menjelaskan bahwa evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat perubahan perilaku atau dampak dari program yang telah dilakukan. Hal ini memberikan alternatif yang dapat digunakan dalam proses evaluasi, baik untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi selama pelaksanaan program yang sedang berlangsung maupun untuk

memperbaiki program yang sudah dilaksanakan.

Seringkali, definisi evaluasi program terbatas pada evaluasi program yang sudah berjalan. Namun, dalam konsep sejati, evaluasi program juga mencakup penilaian terhadap program sebelum pelaksanaannya, selama program berlangsung, dan setelah program selesai, dengan tujuan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan pandangan para ahli di atas mengenai evaluasi program pelatihan, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi program adalah proses pengumpulan informasi yang valid, terstruktur, dan terarah, yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada pihak yang membutuhkan informasi tersebut. Evaluasi program juga melibatkan penilaian terhadap keluaran program dan pengembangan model pembelajaran.

Karena program adalah serangkaian tindakan yang mewakili pelaksanaan kebijakan, maka pada dasarnya evaluasi program adalah tindakan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Maka dalam studi Analisis Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan adalah salah satu bidang penelitian yang penting. Mengapa Evaluasi Kebijakan diperlukan? Karena setiap kebijakan pemerintah (public policy) memiliki risiko untuk menghadapi kemungkinan kegagalan. Abdul Wahab (1990), merujuk pada pendapat Hogwood dan Gunn (1986), menjelaskan bahwa penyebab kegagalan suatu kebijakan dapat dibagi menjadi 2 kategori: (1) karena "non-implementation" atau tidak dilaksanakan sesuai rencana; dan (2) karena "unsuccessful" atau implementasi yang tidak berhasil.

Ketidakimplementasian suatu kebijakan berarti bahwa kebijakan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan perencanaan semula. Sementara itu, implementasi yang tidak berhasil sering terjadi ketika suatu kebijakan sudah dijalankan sesuai rencana, namun akibat faktor-faktor eksternal yang tidak mendukung, kebijakan tersebut tidak dapat mencapai dampak atau hasil yang diinginkan.

Isaac, sebagaimana dikutip oleh Fernandes (1984), mengelompokkan model evaluasi program berdasarkan berbagai orientasi, termasuk: (1) model yang berfokus pada pencapaian tujuan (goal-oriented); (2) model yang berfokus pada pengambilan keputusan (decision-oriented); (3) model yang berfokus pada pelaksanaan kegiatan dan pihak yang terlibat; dan (4) model yang berfokus pada dampak dan pengaruh program. Di sisi lain, menurut Jaedun (2010), beberapa ahli telah mengidentifikasi delapan model evaluasi yang berbeda, yaitu:

1. Model Evaluasi Berorientasi pada Tujuan, yang dikembangkan oleh Tyler.
2. Model Evaluasi Tanpa Tujuan Khusus, yang dikembangkan oleh Scriven.
3. Model Evaluasi Formatif dan Sumatif, yang juga dikembangkan oleh Scriven.
4. Model Evaluasi Berdasarkan Stakeholder, yang dikembangkan oleh Stake.
5. Model Evaluasi Responsif, juga dikembangkan oleh Stake.
6. Model Evaluasi CSE-UCLA, yang menitikberatkan pada kapan evaluasi dilakukan.
7. Model Evaluasi CIPP, yang dikembangkan oleh Stufflebeam.
8. Model Evaluasi Discrepancy, yang dikembangkan oleh Provus..

3. Model Evaluasi Program CIPP

Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) adalah kerangka kerja yang digunakan dalam evaluasi program atau proyek untuk memahami berbagai aspek dan tahapan evaluasi. Model ini dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam dan Anthony J. Shinkfield, dan berfokus pada pemahaman konteks program, input yang digunakan, proses implementasi, dan produk atau hasil dari program (Ambiyar dan Muharika, 2019: 33).

Ia menggunakan model evaluasi CIPP yang terdiri dari kerangka kerja evaluasi yang mencakup empat elemen, yaitu evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk (Context, Input, Process, dan Product atau CIPP). Model ini secara khusus berfokus pada pengambilan keputusan dalam konteks evaluasi program. Pendekatan ini mengidentifikasi empat jenis evaluasi program yang terkait dengan empat jenis keputusan

yang terlibat dalam perencanaan program. Evaluasi konteks program bertujuan untuk menyediakan data yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan program. Evaluasi masukan (input) berupaya memberikan alternatif keputusan terkait dengan desain program dan sumber daya yang akan digunakan dalam program. Evaluasi proses berfokus pada penyediaan alternatif keputusan yang dapat digunakan untuk mengontrol dan mengelola jalannya program. Terakhir, evaluasi produk dimaksudkan untuk memberikan alternatif keputusan terkait dengan hasil program dan tata kelola program tersebut (Ambiyar dan Muharika, 2019: 34).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dapat diketahui bahwa model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, dan Product) adalah salah satu kerangka kerja evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi program, proyek, atau kebijakan. Model ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dan Anthony Shinkfield pada tahun 2007 (Mutrofin, 2018: 48). Model CIPP memiliki empat komponen utama yang mencakup berbagai aspek dalam proses evaluasi:

1. Konteks (Context)

Bagian ini mencakup pengidentifikasian dan pemahaman tentang latar belakang, tujuan, dan konteks di mana program atau proyek beroperasi. Ini mencakup penilaian terhadap isu-isu sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sejarah yang dapat memengaruhi pelaksanaan program atau proyek. Fokus evaluasi konteks adalah untuk memahami tantangan, peluang, dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil program atau proyek.

2. Input (Input)

Bagian ini berfokus pada sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program atau proyek, seperti anggaran, personil, peralatan, dan materi yang digunakan dalam program. Evaluasi input bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia cukup dan sesuai untuk mencapai tujuan program atau proyek.

3. Proses (Process)

Bagian ini berfokus pada pelaksanaan program atau proyek itu sendiri. Ini mencakup penilaian terhadap metode, strategi, dan tindakan yang digunakan dalam menjalankan program atau proyek. Evaluasi proses bertujuan untuk memahami bagaimana program atau proyek dijalankan, termasuk identifikasi potensi perbaikan dalam pelaksanaan.

4. Produk (Product)

Bagian ini fokus pada hasil atau produk yang dihasilkan oleh program atau proyek. Ini mencakup pengukuran terhadap pencapaian tujuan dan dampak yang diharapkan dari program atau proyek. Evaluasi produk bertujuan untuk mengevaluasi apakah program atau proyek mencapai hasil yang diinginkan dan memberikan manfaat yang diharapkan.

Pentingnya model CIPP adalah memungkinkan dilakukannya evaluasi yang komprehensif yang melibatkan pengidentifikasian masalah dalam konteks yang relevan, pengukuran efisiensi dalam penggunaan sumber daya (input), evaluasi kualitas pelaksanaan (proses), dan penilaian terhadap hasil yang dicapai (produk). Dengan pendekatan ini, organisasi dapat membuat perubahan yang lebih baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola program atau proyek mereka agar lebih efektif dan efisien. Sesuai dengan penjelasan tersebut, model evaluasi CIPP digunakan untuk menjelaskan hasil evaluasi perbandingan kualitas pelayanan antara Program SIM Nasional Presisi dengan Program SIM sebelumnya di Ditlantas Polda Metro Jaya.

4. Konsep Program SIM Nasional Presisi

Program SIM Nasional Presisi merupakan implementasi dari konsep E-Policing pada tahun 2021, yang menjadi salah satu terobosan yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Program ini merupakan perluasan dari SIM Online yang berfokus pada integrasi data secara nasional dan proses pendaftaran secara online. SINAR, di sisi lain,

mengintegrasikan seluruh data secara online dan menggabungkan seluruh proses perpanjangan SIM ke dalam satu perangkat lunak. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Korlantas Polisi Republik Indonesia dengan Direktorat Lalu Lintas di seluruh Indonesia, termasuk di antaranya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (Guntur, 2022).

Program SINAR memungkinkan siapa pun dan di mana pun untuk melakukan perpanjangan SIM secara online melalui perangkat lunak mobile. Sebagai proyek percontohan, inovasi ini pertama kali diluncurkan pada 13 April 2021 lalu, diimplementasikan di empat Satpas, termasuk Satpas Daan Mogot dan Satpas Polres Metro Depok yang berada di bawah naungan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, serta Satpas Polres Jombang dan Satpas Polresta Denpasar. Dalam perkembangannya, hingga akhir Desember 2021, program ini telah berkembang lebih lanjut dan diterapkan di 50 Satpas di seluruh Indonesia.

Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan tanda utama untuk berkendara. SIM menjadi dokumen yang menunjukkan bahwa pengendara tersebut telah memenuhi syarat untuk berkendara. Pengendara yang tidak memiliki atau membawa SIM saat berkendara bisa dikenai hukuman pidana, biasanya berupa denda. SIM berlaku 5 tahun, sehingga ketika masa berlakunya habis, pemilik harus melakukan perpanjangan di kantor-kantor Satpas SIM terdekat.

SIM Nasional Presisi (SINAR) adalah program yang dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Korlantas Polri sebagai sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin memperpanjang SIM A atau SIM C secara online. SIM Nasional Presisi (SINAR) adalah aplikasi digital Korlantas Polri dalam memperpanjang SIM A dan SIM C secara online. Awalnya, SIM Nasional Presisi (SINAR) baru diterapkan di 4 Satpas sebagai pilot project pada 13 April 2021 lalu, yaitu di Satpas Polda Metro Jaya, Satpas Polres Metro Depok,

Satpas Polres Jombang, dan Satpas Polresta Denpasar. Namun, seiring perkembangannya, pada tanggal 14 September 2021, program ini diperluas dengan tambahan 20 Satpas. Pada awal tahun 2022, program ini kembali diperluas ke 30 Satpas jajaran Polri.

Keunggulan SIM Nasional Presisi (SINAR) antara lain:

1. Hemat Waktu dan Tenaga: Dengan menggunakan SIM Nasional Presisi (SINAR), masyarakat tidak perlu lagi berjam-jam mengantri di loket pendaftaran dan pembayaran yang biasa terjadi saat mengurus perpanjangan SIM. Prosesnya juga tentu jauh lebih cepat dibandingkan mendaftar di loket pendaftaran offline.
2. Mengurangi Praktik Percaloan: Adanya SIM Nasional Presisi (SINAR) sangat membantu dalam mengurangi praktik percaloan yang biasa ditemui di kantor polisi saat hendak mengurus SIM. Praktik percaloan ini selain mengarahkan pada budaya tidak jujur, juga merugikan masyarakat. Orang yang hendak mengurus perpanjangan SIM harus membayarmahal untuk calo, padahal biaya mengurus SIM sendiri tidak semahal itu.
3. Data Terintegrasi: Data yang dimasukkan dalam program SIM Nasional Presisi (SINAR) akan terintegrasi dengan data dari Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini karena salah satu persyaratan untuk mendaftar SIM Online adalah menggunakan e-KTP, yang mana datanya sudah tersimpan dengan baik. Integrasi data ini juga akan memudahkan pihak kepolisian dalam melakukan monitoring dan reporting data yang ada.
4. Bisa Diakses dari Mana Saja: Jika biasanya seseorang harus pulang kampung atau kembali ke daerah asal yang sesuai dengan alamatnya di KTP untuk mengurus perpanjangan SIM, sekarang tidak lagi. SIM Nasional Presisi (SINAR) bisa diakses dan diurus dari mana saja, seluruh daerah di Indonesia. Nantinya pengurusan secara offline setelah mendaftar SIM Online bisa dilakukan di lokasi terdekat yang dipilih.

5. Mengurangi Penyebaran COVID-19: Sejak COVID-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, berbagai peraturan mengenai protokol kesehatan telah dibuat yang salah satunya adalah menghindari kontak fisik antar masyarakat. Melalui SIM Nasional Presisi (SINAR) ini, masyarakat atau pemohon perpanjangan SIM tidak harus lagi melakukan kontak fisik dengan petugas karena semua prosesnya dilakukan secara online.
6. Meningkatkan Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat: SIM Nasional Presisi (SINAR) merupakan sebuah inovasi kreatif yang mempermudah, mempercepat, akuntabel, dan transparan dalam proses perpanjangan SIM. Dengan berbagai keunggulan tersebut, inovasi ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat tidak hanya terhadap pelayanan kepolisian namun juga akan mampu meningkatkan citra Polri.

METODE PENELITIAN

Penelitian Evaluasi Program Surat Izin Mengemudi (SIM) Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya, dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan yang diterapkan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara, pengamatan, dan studi dokumen, yang selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data, sajian data, dan verifikasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya Berdasarkan Prespektif Context, Input, Process and Product

Program SIM Nasional Presisi (SINAR) adalah program digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada tahun 2021. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam hal pembuatan dan perpanjangan SIM. Program SIM Nasional Presisi memberikan beberapa manfaat, antara lain mempercepat proses pembuatan SIM, mengurangi antrian dan waktu tunggu di Satpas SIM, meningkatkan akurasi data dan keamanan SIM, dan meminimalisir penyalahgunaan SIM.

Masyarakat dapat mengakses aplikasi SIM Online untuk melakukan registrasi dan pembuatan SIM secara online. Program ini menggunakan teknologi canggih, seperti Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan pelanggaran lalu lintas. Program ini melibatkan kerjasama antara Ditlantas Polda Metro Jaya dengan instansi terkait, seperti Satpas SIM Daan Mogot dan Subdit Regident.

Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pelayanan pembuatan SIM. Program ini melibatkan penggunaan aplikasi SIM Online, peningkatan teknologi, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Program ini memberikan manfaat berupa percepatan proses pembuatan SIM, pengurangan antrian, peningkatan akurasi data, dan pencegahan penyalahgunaan SIM.

Pada program SINAR, semua proses pembuatan dan perpanjangan SIM dapat dilakukan secara daring atau online. Pemohon SIM dapat melakukan pendaftaran, ujian teori dan praktik, pembayaran PNPB, hingga pengambilan SIM di rumah. Di Ditlantas Polda Metro Jaya, program SINAR telah mulai diterapkan pada tahun 2022. Proses pembuatan dan perpanjangan SIM di Ditlantas Polda Metro Jaya melalui program SINAR terdiri dari beberapa tahapan (SOLICHAN, 2023).

1. Pendaftaran

Pemohon SIM dapat mendaftar melalui aplikasi SINAR yang tersedia di Play Store atau

- App Store, mengisi data diri, memilih jenis SIM, dan mengunggah foto dan dokumen.
2. Ujian teori
Pemohon SIM akan mengikuti ujian teori secara daring. Ujian teori ini terdiri dari 30 soal pilihan ganda dengan waktu pengerjaan 30 menit.
 3. Ujian praktik
Pemohon SIM akan mengikuti ujian praktik di lapangan. Ujian praktik ini terdiri dari 10 item tes, yaitu:
 - a. Peserta harus dapat mengendarai kendaraan dengan baik dan benar di area yang telah ditentukan.
 - b. Peserta harus dapat mengendalikan kendaraan dengan baik dan benar saat berbelok.
 - c. Peserta harus dapat berhenti dan berjalan dengan baik dan benar di persimpangan.
 - d. Peserta harus dapat menggunakan lampu sein dengan baik dan benar.
 - e. Peserta harus dapat menggunakan sabuk pengaman dengan baik dan benar.
 - f. Peserta harus dapat mematuhi rambu lalu lintas dengan baik dan benar.
 - g. Peserta harus dapat menghindari rintangan dengan baik dan benar.
 - h. Peserta harus dapat memarkir kendaraan dengan baik dan benar.
 2. Pembayaran PNPB
Pemohon SIM harus membayar PNPB SIM sesuai dengan jenis SIM yang akan dibuat. Pembayaran PNPB dapat dilakukan secara daring atau offline.
 5. Pengambilan SIM
SIM yang telah diterbitkan akan dikirimkan ke alamat pemohon melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia. Pemohon dapat mengambil SIM secara langsung di Satpas SIM terdekat jika tidak ingin menggunakan jasa pengiriman PT. Pos Indonesia.
Program SINAR telah memberikan beberapa manfaat bagi masyarakat. Meskipun demikian, program SINAR juga masih memiliki beberapa kekurangan, antara lain aplikasi SINAR masih sering mengalami gangguan, dan proses pengiriman SIM melalui jasa pengiriman PT. Pos Indonesia masih belum optimal. Korlantas Polri terus berupaya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut agar program SINAR dapat memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
- Pendekatan CIPP (Context, Input, Process, and Product) merupakan suatu kerangka kerja evaluasi yang digunakan untuk menganalisis program-program seperti Program SIM Nasional Presisi. Penjelasan mengenai masing-masing elemen CIPP dalam konteks evaluasi program SINAR ini, diantaranya:
1. Context (Konteks): mencakup penilaian terhadap lingkungan, kebijakan, dan kebutuhan yang mendasari program SIM Nasional Presisi. Evaluasi pada tahap ini akan mencakup identifikasi masalah atau kebutuhan di lalu lintas, regulasi yang ada terkait SIM, dan tantangan lingkungan atau sosial yang mempengaruhi keberhasilan program.
 2. Input (Masukan): berkaitan dengan semua sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, seperti anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, kebijakan, serta perencanaan strategis yang digunakan untuk mendukung program SIM Nasional Presisi. Evaluasi pada tahap ini akan melihat apakah sumber daya yang diberikan memadai, sesuai, dan efektif untuk mencapai tujuan program.
 3. Process (Proses): Fokusnya pada bagaimana program tersebut diimplementasikan, termasuk strategi, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan Program SIM Nasional Presisi. Evaluasi di tahap ini akan melihat apakah proses yang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan, serta sejauh mana efisiensi dan kualitas pelaksanaan program.
 4. Product (Produk): mencakup hasil atau output dari Program SIM Nasional Presisi. Evaluasi pada tahap ini akan menilai dampak langsung dari program, apakah tujuan telah tercapai, sejauh mana perubahan positif telah terjadi dalam pelayanan pengurusan

SIM, dan bagaimana hasil ini memengaruhi masyarakat serta sistem transportasi secara keseluruhan.

Evaluasi dengan pendekatan CIPP dapat membantu dalam memahami efektivitas dan keberhasilan Program SIM Nasional Presisi dari berbagai sudut pandang, mulai dari aspek lingkungan yang mendasarinya hingga hasil atau dampak yang dihasilkan. Dengan demikian, penggunaan kerangka kerja CIPP dapat memberikan wawasan yang komprehensif dalam meningkatkan atau memperbaiki program tersebut.

Praktik evaluasi Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya berdasarkan pendekatan CIPP melibatkan beberapa tahapan untuk mengevaluasi program secara komprehensif. Praktik evaluasi yang bisa dilakukan untuk setiap aspek CIPP diantaranya:

1. Konteks (Context)
 - a) Identifikasi tujuan program: Tinjau kembali tujuan dari Program SIM Nasional Presisi dan pastikan bahwa program tersebut masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan saat ini.
 - b) Analisis lingkungan: Evaluasi kondisi lalu lintas, regulasi terkait SIM, dan kebutuhan masyarakat terkait layanan SIM.
 - c) Tinjauan kebijakan: Periksa kebijakan yang berlaku dan perubahan kebijakan apa pun yang dapat memengaruhi program.
2. Masukan (Input)
 - a) Evaluasi sumber daya: Tinjau alokasi anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, dan sumberdaya lain yang digunakan dalam program.
 - b) Periksa ketersediaan sumber daya: Pastikan bahwa sumber daya yang ada memadai dan sesuai dengan kebutuhan program.
 - c) Evaluasi perencanaan strategis: Tinjau apakah perencanaan program telah sesuai dengan kebutuhan atau apakah ada perbaikan yang dapat dilakukan.
3. Proses (Process)
 - a) Tinjau pelaksanaan program: Evaluasi bagaimana program dijalankan, termasuk strategi, kegiatan, dan prosedur yang dilakukan dalam pelayanan perizinan SIM.
 - b) Analisis efisiensi: Tinjau apakah proses yang dijalankan sudah cukup efisien atau perlu perbaikan.
 - c) Perbaikan proses: Identifikasi area di mana perbaikan dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program.
4. Produk (Product)
 - a) Evaluasi hasil program: Tinjau hasil atau output yang dihasilkan dari Program SIM Nasional Presisi. Misalnya, tingkat peningkatan efisiensi layanan, peningkatan kepatuhan hukum dalam penerbitan SIM, atau perubahan positif dalam statistik kecelakaan.
 - b) Evaluasi dampak: Tinjau dampak dari hasil program terhadap masyarakat dan sistem transportasi secara keseluruhan.

Selama evaluasi, berbagai metode dan instrumen penelitian dapat digunakan, seperti survei, wawancara, analisis data statistik, pemantauan lapangan, atau perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan. Data dan informasi yang terkumpul akan membantu dalam mengevaluasi setiap aspek program secara menyeluruh.

Selain itu, evaluasi harus melibatkan para pemangku kepentingan terkait, seperti petugas lalu lintas, petugas SIM, masyarakat umum, dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas terkait program ini. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk merekomendasikan perbaikan, pengembangan, atau bahkan penghentian program jika diperlukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya dapat terus meningkatkan

kualitas layanan serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi Perbandingan Kualitas Pelayanan Antara Program SIM Nasional Presisi Dengan Program SIM Sebelumnya di Ditlantas Polda Metro Jaya Berdasarkan Prespektif Context, Input, Process and Product

Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki beberapa perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan program SIM sebelumnya. Program SIM sebelumnya tidak memanfaatkan teknologi dan sistem informasi secara optimal. Proses pelayanan dan administrasi mungkin lebih manual. Program SIM Nasional Presisi memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang lebih canggih, seperti penggunaan sistem online untuk pengurusan SIM, integrasi basis data, atau aplikasi mobile untuk mempermudah pemohon SIM.

Pelayanan program Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan rangkaian layanan yang diberikan oleh otoritas terkait di sebuah negara kepada individu yang ingin memperoleh atau memperpanjang izin untuk mengemudi. Proses ini umumnya mencakup beberapa tahapan yang harus diikuti oleh calon pengemudi sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut khususnya di Indonesia.

Calon pengemudi harus mendaftar di lembaga atau instansi yang ditunjuk, biasanya kantor Departemen Perhubungan atau lembaga otoritas lainnya. Mereka akan diminta untuk mengajukan dokumen dan informasi yang diperlukan untuk memulai proses perizinan. Setelah pendaftaran, calon pengemudi harus mengikuti ujian teori untuk menguji pemahaman mereka tentang aturan lalu lintas, tanda-tanda jalan, dan peraturan terkait lainnya. Setelah lulus ujian teori, calon pengemudi akan diuji dalam situasi nyata dengan mengemudikan kendaraan di jalan raya atau area yang disediakan untuk ujian praktik. Mereka harus menunjukkan keterampilan mengemudi yang baik dan pengetahuan tentang operasi kendaraan.

Jika calon pengemudi lulus ujian teori dan praktik, mereka akan memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM tersebut akan memiliki kategori atau kelas yang menentukan jenis kendaraan apa yang boleh mereka kemudikan (misalnya, mobil pribadi, sepeda motor, atau kendaraan komersial) dan apakah ada pembatasan lainnya. SIM memiliki masa berlakutertentu. Sebelum masa berlaku habis, pengemudi harus memperpanjang SIM mereka dengan mengikuti prosedur yang mungkin mirip dengan pendaftaran awal. Ini bisa melibatkan uji kesehatan atau ujian tertentu yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pelayanan program Surat Izin Mengemudi berfokus pada memberikan wewenang kepada individu untuk mengemudi kendaraan dengan memastikan bahwa mereka memahami aturan lalu lintas, memiliki keterampilan mengemudi yang memadai, serta dalam kondisi kesehatan yang memadai untuk berkendara. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dalam lalu lintas jalan raya dan memastikan para pengemudi mematuhi aturan yang berlaku.

Proses pelayanan sebelumnya lebih lambat dan memakan waktu. Antrian panjang dan prosedur yang kompleks mungkin menjadi masalah. Kepatuhan terhadap regulasi dan hukum kurang diawasi secara ketat. Program SIM Nasional Presisi menekankan pada efisiensi dan kecepatan pelayanan. Penyederhanaan prosedur, pengurangan waktu tunggu, dan peningkatan kecepatan dalam pengurusan SIM mungkin menjadi prioritas. Program SIM Nasional Presisi menempatkan penekanan pada peningkatan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum terkait pengurusan SIM dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Kualitas pelayanan sebelumnya bervariasi dan tidak konsisten serta kurangnya akses informasi terkait aturan, prosedur, atau persyaratan untuk pengurusan SIM. Penyimpangan atau kekurangan dalam pelayanan mungkin sering terjadi. Program SIM Nasional Presisi

menekankan pada pelayanan yang lebih konsisten, standar yang lebih tinggi, dan peningkatan dalam pengawasan mutu layanan. Program SIM Nasional Presisi memperhatikan edukasi publik, memberikan akses yang lebih baik terhadap informasi terkait prosedur, persyaratan, dan aturan terbaru terkait SIM.

Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas pelayanan pengurusan SIM dibandingkan dengan program SIM sebelumnya. Hal ini bisa tercermin dari pemanfaatan teknologi yang lebih baik, fokus pada efisiensi, kualitas pelayanan yang lebih baik, edukasi yang lebih baik kepada masyarakat, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi.

Untuk mengevaluasi perbandingan kualitas pelayanan antara Program SIM Nasional Presisi dengan program SIM sebelumnya di Ditlantas Polda Metro Jaya, kita dapat menerapkan pendekatan CIPP (Context, Input, Process, and Product) untuk setiap program. Adapun evaluasi perbandingan kualitas pelayanan berdasarkan perspektif CIPP, meliputi:

1. Konteks (Context)

- a) Program SIM Sebelumnya: Evaluasi kondisi sebelum diterapkannya Program SIM Nasional Presisi, termasuk peraturan, infrastruktur, serta kondisi masyarakat terkait pengurusan SIM.
- b) Program SIM Nasional Presisi: Tinjau ulang tujuan, kebijakan, dan kebutuhan yang melatarbelakangi implementasi program ini.

2. Masukan (Input)

- a) Program SIM Sebelumnya: Tinjau sumber daya yang digunakan dalam program sebelumnya, termasuk anggaran, personel, dan infrastruktur.
- b) Program SIM Nasional Presisi: Evaluasi sumber daya yang dialokasikan untuk program ini, apakah lebih memadai, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan.

3. Proses (Process)

- a) Program SIM Sebelumnya: Evaluasi prosedur pelayanan yang digunakan dalam program sebelumnya, seperti waktu tunggu, prosedur pengurusan, dan kualitas layanan.
- b) Program SIM Nasional Presisi: Tinjau bagaimana prosedur pelayanan dijalankan dalam program ini, apakah terjadi perbaikan dalam efisiensi, waktu layanan, dan peningkatan kualitas.

4. Produk (Product)

- a) Program SIM Sebelumnya: Evaluasi hasil yang dihasilkan dari program sebelumnya, seperti tingkat kepuasan pengguna, kepatuhan terhadap aturan, atau efektivitas proses pengurusan SIM.
- b) Program SIM Nasional Presisi: Tinjau hasil atau output yang dihasilkan, apakah ada peningkatan dalam kepuasan pengguna, peningkatan kepatuhan terhadap aturan, atau peningkatan efektivitas pengurusan SIM.

Praktik evaluasi ini melibatkan pengumpulan data terkait setiap aspek (konteks, masukan, proses, dan produk) dari kedua program SIM. Metode yang dapat digunakan termasuk survei pengguna, analisis data, wawancara dengan petugas pelayanan dan pemohon SIM, serta pemantauan langsung terhadap proses pelayanan.

Dari hasil evaluasi ini, akan dapat dilihat perbandingan kualitas pelayanan antara program SIM sebelumnya dan Program SIM Nasional Presisi, memungkinkan untuk mengidentifikasi area di mana program terbaru telah memberikan perbaikan dan di mana masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut. Evaluasi ini akan membantu dalam menentukan apakah perubahan ke arah SIM Nasional Presisi telah memberikan manfaat yang signifikan dalam kualitas layanan dibandingkan dengan program sebelumnya di Ditlantas Polda Metro Jaya.

KESIMPULAN

Program SIM Nasional Presisi (SINAR) merupakan inisiatif digitalisasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang diluncurkan oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pada tahun 2021. Bertujuan meningkatkan pelayanan publik di bidang pembuatan dan perpanjangan SIM, SINAR mempercepat proses, mengurangi antrian, dan meminimalisir penyalahgunaan SIM melalui aplikasi SIM Online. Meskipun memberikan manfaat signifikan, program ini masih menghadapi tantangan teknis seperti gangguan pada aplikasi SINAR dan kendala pengiriman SIM melalui PT. Pos Indonesia. Evaluasi menggunakan pendekatan CIPP membantu menganalisis berbagai aspek program, dari konteks hingga dampaknya, guna memperbaiki efektivitas dan keberhasilannya. Evaluasi praktik di Ditlantas Polda Metro Jaya melibatkan tahapan analisis menyeluruh terhadap tujuan, sumber daya, proses, dan hasil program untuk meningkatkan kualitas layanan SIM. Program SIM Nasional Presisi di Ditlantas Polda Metro Jaya memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan program SIM sebelumnya. Program ini memanfaatkan teknologi canggih dan sistem informasi untuk mempercepat layanan pembuatan dan perpanjangan SIM, fokus pada efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, edukasi masyarakat, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Evaluasi menggunakan pendekatan CIPP membantu membandingkan kualitas layanan antara kedua program, menyoroti perbedaan dalam konteks, sumber daya, proses, dan hasil, yang memungkinkan identifikasi area perbaikan dan ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

BIBLIOGRAFI

- bahyogi Sapril Siallagan, B. S. S. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Muaro Jambi*. Universitas Batanghari.
- Christiani, Y. (2018). Penerapan Model CIPP dalam Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 6(1).
- Edithya, K. V. (2019). *Evaluasi Kinerja Polda Lampung Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian Melalui Program E-Policing*.
- Gopinath, A. R., Aishwarya, S. S., Lakshmi, K. R., Lakshmi Devi, M. S., & Divya Bharathi, H. Y. (2021). *Automated Driving License Evaluation*.
- Mulyani, T., Yulistyowati, E., & Astanti, D. I. (2020). Peningkatan Pemahaman Siswa Sma Negeri I Boja Mengenai Sanksi Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur. *Kadarkum: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–17.
- Mustafa, P. S. (2021). Model Discrepancy sebagai Evaluasi Program Pendidikan. *PALAPA*, 9(1), 182–198.
- Nastiti, F. A. (2017). Hubungan antara kepemilikan SIM C dan keikutsertaan dalam tes pembuatan SIM dengan pengetahuan berkendara dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sidoarjo. *The Indonesian Journal of Public Health*, 12(2), 167–178.
- Paramitha, N. M. A., & Mulyadi, M. (2017). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Dan Pengambilan Keputusan Investasi Di Pt. Bank Negara

- Indonesia (Bni) 46 Cabang Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 306–317.
- Pongsilurang, H. (2022). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Penggunaan Teknologi Informasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Bappeda Kabupaten Toraja Utara= The Effect Of Budget Planning, Human Resources Competence And The Using Of Information Tech*. Universitas Hasanuddin.
- Rahmawati, D. (2019). *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Di Polresta Pekanbaru (studi Kasus SIM Keliling)*. Universitas Islam Riau.
- Safria, H. (2020). *Pelaksanaan Sistem Audio Visual Integrited System (AVIS) Dalam Penerbitan SIM Di Kantor Satpas Sim Polres Aceh Barat*. UIN Ar-Raniry.
- SOLICHAN, S. (2023). *Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Polda Jateng*. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan Dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148–178.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. Brilliant.
- Sulistiyo, R. D., & Shihab, M. R. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri. *Technomedia Journal*, 8(2SP), 189–204.
- Sumaryanto, S., & Kustiyono, K. (2016). *Proceeding Seminar Nasional Science And Engineering 2016 “Quantum Technology for Better Future” Eco-friendly Manufacturing, Design and Construction Methods (Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Sebagai Pendukung* .
- Suryadin, A., Sari, W. P., & Nurfitriani, M. P. (2022). *Evaluasi Program Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) antara Teori dan Praktiknya*. Samudra Biru.
- Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 21–38.
- Yanti, A. D. (2021). *Analisis Kompetensi Guru Kelas Vb Dalam Mempersiapkan Perangkat Pembelajaran Tematik Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 02 Kota Bengkulu*. UIN Fatmawati Sukarno.